

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - Perangkat Daerah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan rencana Program Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merujuk pada tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui penetapan program-program dan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
 11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA adalah agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menerangkan perencanaan kerja yang akan dilakukan pada tahun 2019, dan sejalan dengan upaya mewujudkan good governance yang mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur;
2. Sebagai pedoman dalam untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
4. Dasar untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur harus terus berupaya dan berusaha memperbaiki kekurangan/kelemahan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/Flash back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.






Berkaitan dengan pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, telah melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 dan tahun 2018. Dan evaluasinya dapat dilihat pada lampiran form.8 dengan penjelasan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 168.089.915,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 42.000.000,- realisasi sebesar Rp. 28.914.710,- atau 68,84% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 36.000.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 9.116.480,- atau 25.23% dari target yang direncanakan

✚ ini berarti target yang telah direncanakan dapat di anggap telah tercapai

sesuai dengan yang direncanakan karena jasa listrik tergantung dari pemakaian dayanya

-  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 83.280.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 31.680.000,- realisasi sebesar Rp. 31.512.000,- atau 99% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 51.600.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 0,- atau 0% dari target yang direncanakan tidak dapat direalisasikan hal ini disebabkan adanya perubahan jenis belanja dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung.
-  Penyediaan jasa kebersihan kantor total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 67.000.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 16.000.000,- realisasi sebesar Rp. 15.973.000,- atau 99% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 16.000.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. .386.000,- atau 0.024% dari target yang direncanakan tidak dapat direalisasikan sesuai rencana karena cleaning service yang ada sebelumnya mengundurkan diri, sementara menunggu persetujuan untuk cleaning service baru.
-  Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 72.950.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 11.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.315.000,- atau 67% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 15.750.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. .4.140.000,- atau 26,26% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
-  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 8.685.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi sebesar Rp. 1.196.500,- atau 100% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 1.235.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 541.000,- atau 43% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
-  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, total

anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 29.040.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 6.600.000,- realisasi sebesar Rp. 4.570.000,- atau 69,24% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 6.180.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.640.000,- atau 26,54% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.




✚ Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 1.082.775.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 204.915.000,- realisasi sebesar Rp. 204.436.300,- atau 99% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 205.165.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 106.370.838,- atau 51,85% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 665.000.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 132.000.000,- realisasi sebesar Rp. 123.500.000,- atau 94% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 138.000.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 57.500.000,- atau 41,66% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.


✚ Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan PERANGKAT DAERAH, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 259.547.200,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 59.852.100,- realisasi sebesar Rp. 45.817.850,- atau 77% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 57.967.100,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.750.500,- atau 11,65% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Kunjungan kerja dalam daerah, total anggaran yang ditargetkan dalam Renstra 2016-2021 sebesar Rp. 329.766.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 85.937.000,- realisasi sebesar Rp. 77.756.550,- atau 90% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 79.073.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.25.762.300,-atau 32.29% dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

-  Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 225.800.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 106.070.000,- realisasi sebesar Rp. 92.839.500,- atau 99% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 0,- atau 0% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
-  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 101.250.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 17.250.000,-,- realisasi sebesar Rp. 11.058.500,- atau 64% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 16.000.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.000.000,- atau 100% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
-  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 146.700.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 34.000.000,-,- realisasi sebesar Rp. 24.074.750,- atau 70.80% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.975.000,- atau 26.50% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

-  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 21.250.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 0,- dan target tahun 2018 sebesar Rp. 5.250.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 0,- atau 0% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

-  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah total

anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 17.680.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.371.500,- atau 59% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 4.090.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 3.410.000,- atau 83.37% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah, dengan kegiatan:

- ✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PERANGKAT DAERAH total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 17.680.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.554.600,- atau 65% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 8.116.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 495.000,- atau 6.10% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan:

- ✚ Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA) total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 346.708.300,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 91.550.000,- realisasi sebesar Rp. 72.364.000,- atau 79% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 165.661.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 30.694.400,- atau 18% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
- ✚ Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 31.421.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 94.765.000,- realisasi sebesar Rp. 83.960.000,- atau 89% kegiatan ini hanya dilaksanakan sampai tahun 2017 untuk tahun 2018 berubah nama nomenklatur kegiatan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial target sebesar Rp. 91.748.500,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 4.165.000,- atau 4.5% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

- ✚ Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 241.064.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 48.310.000,- realisasi sebesar Rp. 16.581.400,- atau 34% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 31.421.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 12.210.000,- atau 38.85% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:

- ✚ Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 327.169.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 131.818.000,- realisasi sebesar Rp. 103.247.850,- atau 78% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 112.440.500,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 79.940.500,- atau 71.09% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
- ✚ Perkemahan Persaudaraan Generasi Muda Sul - Sel total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 78.700.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 37.760.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 40.940.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.0 atau 0% dari target yang rencanakan tidak dapat terealisasi sesuai rencana dan kegiatan tidak lagi dianggarkan untuk tahun berikutnya..
- ✚ Pendidikan Bela Negara total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 3.384.670.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.450.210.000,- realisasi sebesar Rp. 1.421.133.200,- atau 98% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 634.820.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 634.110.000,- atau 99.37% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
- ✚ Gerakan Nasional Revolusi Mental total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 295.830.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 196.577.500,- realisasi sebesar Rp. 94.727.500,- atau 48% dan target tahun

2018 sebesar Rp. 99.252.500,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 12.163.000,- atau 12.25% dari dari target yang rencanakan tidak dapat terealisasi sesuai rencana.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:

- ✚ Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 391.881.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 76.055.000,- realisasi sebesar Rp. 59.639.000,- atau 78% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 69.726.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. . 910.000,- atau 1.30% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan:

- ✚ Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 391.881.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 210.525.000,- realisasi sebesar Rp. 129.410.600,- atau 61% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 249.297.500,-. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 159.615.000,- atau 64.03% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan:

- ✚ Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas & LSM total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 240.558.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 28.750.000,- realisasi sebesar Rp. 15.020.200,- atau 52% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 69.567.500,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.830.000,- atau 5.50% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.
- ✚ Pertemuan Ormas dan LSM dengan Pemerintah Daerah dan Sosialisasi Undang-undang total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 126.533.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 36.620.000,- realisasi

sebesar Rp. 34.089.500,- atau 93% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 48.007.500,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Fasilitasi Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 126.533.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 31.817.500,- realisasi sebesar Rp. 20.465.200,- atau 64% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 34.761.500,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.823.500,- atau 22.51% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Bimbingan Teknis Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Bendahara Partai Politik total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 84.732.500,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 27.765.000,- realisasi sebesar Rp. 19.401.000,- atau 70% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 36.662.500,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 21.184.500,- atau 57.78% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Pemantauan Situasi Politik Daerah total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 169.458.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 40.130.000,- realisasi sebesar Rp. 29.170.000,- atau 73% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 42.164.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.050.000,- atau 42.80% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

✚ Pendidikan Politik bagi Anggota Partai Politik total anggaran mulai tahun 2016-2021 sebesar Rp. 334.302.000,- target untuk tahun 2017 sebesar Rp. 184.040.000,- realisasi sebesar Rp. 149.193.000,- atau 81% dan target tahun 2018 sebesar Rp. 150.262.000,- Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 180.000,- atau 00.01% dari dari target yang rencanakan akan terealisasi sesuai rencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2008.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur

No	INDIKATOR	SPM / Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahun n-2 2017	Tahun n-1 2018	Tahun n 2019	Tahun n+1 2020	Tahun n-2 2017	Tahun n-1 2018	Tahun n 2019	Tahun n+1 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penanganan konflik Sosial		Persentase penangana n konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penanganan konflik Politik		Persentase Penangana n konflik Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Jumlah Nilai LAKIP		Jumlah Nilai LAKIP	cc (55)	B (60)	BB (70)	BB (70)	cc (57)	B (60)	BB (70)	BB (70)	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II bulan Juni mencapai 42.91% .

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah keterbatasan pegawai yang ada, terbatasnya sarana prasarana, SDM aparat pelaksana kurang memadai dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang – undangan di bidang Politik dan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dari isu – isu di atas dapat direkomendasikan antara lain :

- 1) Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan maka akan diperbanyak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- 2) Dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Daerah diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Polri / TNI, instansi terkait, FKUB, FKDM, FPK, KOMINDA, aparat tingkat kecamatan dan aparat desa/kelurahan hingga ke tingkat RT dan Dusun.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah pada awal tahun RKPD mencapai 88,67%, dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 2.293.389.576,- dimana Realisasi sebesar Rp. 2.033.458.086,-, dimana masih ada beberapa kegiatan yang belum sempat dilaksanakan disebabkan oleh banyaknya kegiatan – kegiatan luar sehingga kegiatan yang sedianya direncanakan dibatalkan, untuk kedepannya kami akan mengupayakan agar kegiatan yang tidak terlaksana di tahun kemarin

bisa dilaksanakan pada tahun ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum / kurang mengetahui. Sehingga meskipun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan Sosialisasi terhadap aparat di tingkat Kecamatan/Kabupaten dengan menghadirkan Tokoh – tokoh agama, TNI, POLRI, FKUB, FKDM, FPK dan KOMINDA akan tetapi hasil yang dicapai belum maksimal, hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi langsung ke masyarakat akan informasi – informasi yang dibutuhkan tersebut, untuk itu di tahun 2019 ini kami mengupayakan memperbanyak melakukan sosialisasi ke masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan :

1. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama dan Stabilitas Politik di Masyarakat
- 2 Mewujudkan Kinerja Pelayanan OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

3.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
2. Terwujudnya Kehidupan Politik yang Demokratis
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- j. Rapat – rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
- l. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Operasional
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Untuk tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dan aparatur siap pakai serta berkualitas.

- 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun
- 5. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan & Penganggaran Perangkat Daerah
- 6. Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa** didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 - b. Pendidikan Bela Negara
 - c. Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental
 - d. Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing, NGO & Lembaga Asing
 - e. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama
 - f. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - g. Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah
- 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas, dan LSM
Kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan terhadap Parpol, Ormas dan LSM.
 - b. Rencana Penggunaan & Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat
 - d. Pemantauan Situasi Politik Daerah
 - e. Fasilitasi Desk Pemilihan Umum
 - f. Sosialisasi Pemilih Pemula.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur di maksudkan dengan harapan semoga pelaksanaan program kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak interfensi program dan kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan di bidang Politik dan Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2019 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama dan Stabilitas Politik di Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2018

KEPALA KANTOR,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19710502 199208 1 001

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur di maksudkan dengan harapan semoga pelaksanaan program kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak interfensi program dan kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan di bidang Politik dan Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2019 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama dan Stabilitas Politik di Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2018

KEPALA KANTOR,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19710502 199208 1 001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	(10)=(5+7+9)	11
02	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah tindak pencegahan dini yang dilakukan	16 kasus	-	7 kasus	7 kasus	0%	7 kasus	14	- kasus
21	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan situasi politik yang kondusif	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	8 %
07	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas dan LSM	Jumlah parpol, ormas, lsm yang dipantau, diawasi dan dievaluasi	213 unit	67 unit	40 ormas	208 ormas	520%	40 ormas	315	69 ormas
08	Pertemuan Ormas dan LSM dengan Pemerintah daerah dan Sosialisasi Undang - undang	Jumlah ormas dan lsm yang mengikuti pertemuan	140 org	-	100 org	100 org	0%	100 org	200	-
09	Facilitasi Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah parpol yang diverifikasi spt bantuan keuangan	56 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	10 parpol	30	10 parpol
10	Bimbingan Teknis Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Bendahara Partai Politik	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti bimtek	250 org	27 org	50 org	16 org	32%	50 org	93	16 org
11	Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah penanganan kasus politik yang diselesaikan	16 kasus	-	7 kasus	7 kasus	0%	7 kasus	14	-
12	Pendidikan Politik Bagi Anggota Partai Politik	Jumlah anggota parpol yg mengikuti pendidikan politik	-	-	120 org	104 org	0%	120 org	224	-



 Mengetahui,
 Matih, Juli 2018
 Kepala Kantor
 Kecamatan Kuning
 GUNTUR HARDO, SP.d, Msi
 NIP : 19710502199208 1001

1	2	3	4	5	6
08	Program Perencanaan dan Penganggaran	Ktr KesbangPol	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang tersusun tepat waktu (%)	100 %	-
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Ktr KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	7 dok	-
15	Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	Ktr KesbangPol	Persentase konflik Sosial yang difasilitasi	97 %	-
1	Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA)	Ktr KesbangPol			Dihilangkan sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2018
2	Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan orang Asing, NGO dan lembaga Asing	Ktr KesbangPol	Jumlah laporan pemantauan orang asing	4 Dok	-
3	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Ktr KesbangPol	Jumlah laporan konflik sosial	4 dok	-
4	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Ktr KesbangPol	Jumlah Laporan FKUB	4 dok	-
5	Pendidikan Bela Negara	Ktr KesbangPol	Jumlah Peserta Bela Negara (orang)	80 org	-
6	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Ktr KesbangPol	Jumlah Laporan (Dokumen)	4 dok	-
7	Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Ktr KesbangPol	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Di Daerah (Orang)	1 Tim	-
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ktr KesbangPol	Persentase konflik Politik yang difasilitasi	95 %	-
1	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas dan LSM	Ktr KesbangPol	Persentase SKT yang terbit (%)	95 %	-
2	Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Ktr KesbangPol	Jumlah Laporan hasil diverifikasi SPJ Partai Politik	2 dok	-
3	Pemantauan Situasi Politik Daerah	Ktr KesbangPol	Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	4 dok	-
4	Sosialisasi Terhadap Pemilih Pemula	Ktr KesbangPol	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemilih pemula (orang)	372 org	-
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	Ktr KesbangPol	Jumlah peserta yang mengikuti diklat pendidikan politik bagi anggota partai politik (orang)	170 org	-
6	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum	Ktr KesbangPol	Terbentuknya Tim Desk Pemilihan Umum	1 tim	-

Malili, Juli 2018
Mengetahui,
Kepala Kantor

GUNTUR HAFID, SP.d, Msi
Nip : 19710502 199208 1001



TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Form 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	(10)=(5+7+9)	11
5.2	Belanja Langsung									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	100%	100%	100%	2	16
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	15 rek	3 rek	3 rek	3 rek	100%	36 rek	42	15 rek
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran	95 %	-	95 %	95 %	0%	5 orng	100	-
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	1 unit	-	1 unit	1 unit	0%	1 unit	-	-
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	76 unit	21 unit	22 unit	22 unit	100%	21 unit	64	3 unit
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diberikan penerangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	1 unit
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran / majalah yang disiapkan	30 exp	3 exp	3 exp	3 exp	100%	36 exp	42	15 exp
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rakor yang diikuti	350 kali	44 kali	49 kali	74 kali	151%	48 kali	166	35 kali
19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah upah jasa yang dibayarkan	45 org	9 org	10 org	10 org	100%	10 org	29	10 org
22	Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD	Persentase penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	100 %	98 %	95 %	95 %	100%	5 Jenis	198	3 Jenis
24	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan	1.997 kali	-	265 kali	447 kali	0%	394 kali	841	185 kali
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	5 %
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	50 unit	6 unit	10 unit	10 unit	100%	3 unit	19	- unit
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	1 unit

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	(10)=(5+7+9)	11
		24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	1 unit
		05	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	- %
		03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (orang)	- org					21 org	21	19 Org
		05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	- %
		03	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	50 org	5 org	10 org	- org	0%	9 org	14	3 Org
		06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya dokumen pelaporan yang dapat selesai tepat waktu	5 dok	-	1 dok	1 dok	0%	1 dok	2	- dok
		05	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen LAKIP yang dibuat	5 dok	-	1 dok	1 dok	0%	1 dok	2	1 dok
		08	Program Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD	35 dok	-	7 dok	7 dok	0%	7 dok	14	- dok
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	35 dok	-	7 dok	7 dok	0%	7 dok	14	4 dok
		15	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	97 %	97 %	97 %	97 %	100%	97 %	291	2 %
		07	Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah rakor yang dilakukan dalam menunjang kamtibmas	10 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100%	6 kali	9	3 kali
		09	Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing yang didata dan diawasi	2.200 org	485 org	400 org	394 org	99%	400 org	1.279	139 org
		12	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang ditangani	16 kasus	1 kasus	7 kasus	6 kasus	86%	1 Ka;i	8	- kasus
		17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Menurunnya Radikalisme	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	75 %
		01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah rakor FKUB yang dilakukan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3	1 kali
		04	Perkemahan Persaudaraan Generasi Muda Sul-Sel	Jumlah peserta yang mengikuti kemah	50 org	-	7 org	- org	0%	10 org	10	- org
		05	Pendidikan Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti bela negara	500 org	-	144 org	144 org	0%	80 org	224	80 Org
			Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi gerakan revolusi mental (orang)			500 org	497 org		500 Orang	997	- Org
		18	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya tali silaturahmi antar etnis	65 etnis	13 etnis	13 etnis	13 etnis	100%	13 etnis	39	-
		04	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah etnik/etnis yang ada di kab. Luwu timur	65 etnis	13 etnis	13 etnis	13 etnis	100%	13 etnis	39	-
		19	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatkan pencegahan dini di masyarakat	95 %	-	95 %	95 %	0%	95 %	190	1 %

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	(10)=(5+7+9)	11
		02	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah tindak pencegahan dini yang dilakukan	16 kasus	-	7 kasus	7 kasus	0%	7 kasus	14	- kasus
		21	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan situasi politik yang kondusif	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	285	8 %
		07	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas dan LSM	Jumlah parpol, ormas, lsm yang dipantau, diawasi dan dievaluasi	213 unit	67 unit	40 ormas	208 ormas	520%	40 ormas	315	69 ormas
		08	Pertemuan Ormas dan LSM dengan Pemerintah daerah dan Sosialisasi Undang - undang	Jumlah ormas dan lsm yang mengikuti pertemuan	140 org	-	100 org	100 org	0%	100 org	200	-
		09	Fasilitasi Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah parpol yang diverifikasi spj bantuan keuangan	56 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	10 parpol	30	10 parpol
		10	Bimbingan Teknis Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Bendahara Partai Politik	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti bimtek	250 org	27 org	50 org	16 org	32%	50 org	93	16 org
		11	Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah penanganan kasus politik yang diselesaikan	16 kasus	-	7 kasus	7 kasus	0%	7 kasus	14	-
		12	Pendidikan Politik Bagi Anggota Partai Politik	Jumlah anggota parpol yg mengikuti pendidikan politik	-	-	120 org	104 org	0%	120 org	224	-

Malili, Juli 2018
Mengetahui,
Kepala Kantor

GUNTUR HAFID, SP.d, Msi
Nip : 19710502 199208 1001